RENCANA KERJA
TAHUN 2023

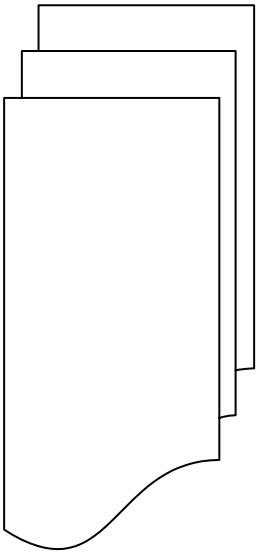

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

Jln. T.M.P Lapaktana No. 5 Telp. (0383) 21151,
Fax (0383) 21453 Kode Pos 86218
e-mail : diskopukm_flotim@yahoo.com
LARANTUKA

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan, sehingga penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.. RENJA Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD Tahun 2023.

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 ini merupakan Dokumen Rencana Pembangunan satu tahun yang memuat Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, yang disususn secara sinergis dan berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sasaran/indikator hasil dan keluaran yang terukur beserta rincian pendanaannya. Dokumen RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2023 disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah .

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat menjadi acuan bagi Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah untuk menyusun rencana kegiatan dan anggaran Tahun 2023.

Larantuka, Juli 2022
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan MenengahKabupaten Flores Timur,

Achmad R. Duli, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 199203 1 008

DAFTAR ISI

Halaman
Kata pengantar i
Daftar isi..... .ii
BAB I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 5
1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... 8
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 10
2.4 Review Terhadap Rancangan Renja… 11
2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat..... 12

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... .13
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja perangkat Daerah 13
3.3 Program dan Kegiatan..... .15

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 16

BAB. V. PENUTUP 17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah..... **3**

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

SALINAN

BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Flores Timur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13);

11. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPPPD adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagi unsur penunjang perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode tahun 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencanan belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2023 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

(2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra PD, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD, yang disusun dengan berpedoman pada Renstra PD dan RKPD Tahun 2023.

(3) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : Pendahuluan
b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
c. BAB III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
e. BAB V : Penutup

(4) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Renja PD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun RKA PD.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

(1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RKPD Tahun 2023.

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD.

(3) Kepala BPPPPD melakukan evaluasi RKPD Tahun 2023 dengan menggunakan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2023.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

PENJABAT BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

DORIS ALEXANDER RIHI

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YORDANUS HOGA DATON
PEMBINA TK.I
NIP. 19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sektoral, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik Tahun 2023, Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Dengan demikian Renja PD Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022.

Renja PD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang startegis dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, karena (1) *secara substansial*, memuat tujuan dan sasaran perangkat daerah, program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran serta pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; (2) *secara normatif*, menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah; (3) *secara operasional*, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan berdasarkan bidang urusan serta pembagian tugas dan fungsi, (4) *secara faktual*, menjadi tolak ukur untuk penilaian capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sektoral melalui realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Renja PD Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023 merupakan penjabaran Tahun pertama Renstra PD Dinas Perkebunan dan Peternakan Tahun 2023-2026, untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Renja PD Tahun 2023 memuat arah kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan ketentuan tersebut tahapan penyusunan Renja PD adalah sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan penyusunan; orientasi mengenai Renja PD serta penyiapan data dan informasi pembangunan Daerah.
2. Penyusunan rancangan awal; dilakukan berdasrkan Renstra PD dan hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah dan hasil evaluasi Renja PD Tahun 2021.
3. Penyusunan Rancangan; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan awal Renja PD berdasarka surat edaran Bupati Flores Timur Nomor..... Tentang Pedoman 2 Penyempurnaan Rancangan Renja PD
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; dilakukan dengan pembahasan rancangan Renja PD bersama pemangku kepentingan untuk meperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran sesuai tugas dan fungsi perangkat Daerah
5. Perumusan Rancangan Akhir; dilakukan dengan menyempurnakan rancangan Renja PD berdasarkan hasil musrenbang dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023;
6. Penetapan; dilaksanakan berdasrkan hasil verifikasi rancangan akhir Renja PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Flores Timur.

Hasil penajaman program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif Renja PD berdasarkan rekomodasi Bappelitbangda, selanjutnya diusulkan untuk penetapan Renja PD dengan Peraturan Bupati. Sebagimana telah diuraikan diatas Renja PD Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Selanjutnya Renja PD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan recana kerja dan anggaran perangkat Daerah Tahun 2023. Hubungan Renja PD dengan Dokumen perencanaan lainnya dan Dokumen anggaran sebagaimana digambarakan pada Gambar 1.1 sebagai berikut;

Gambar1.1

Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

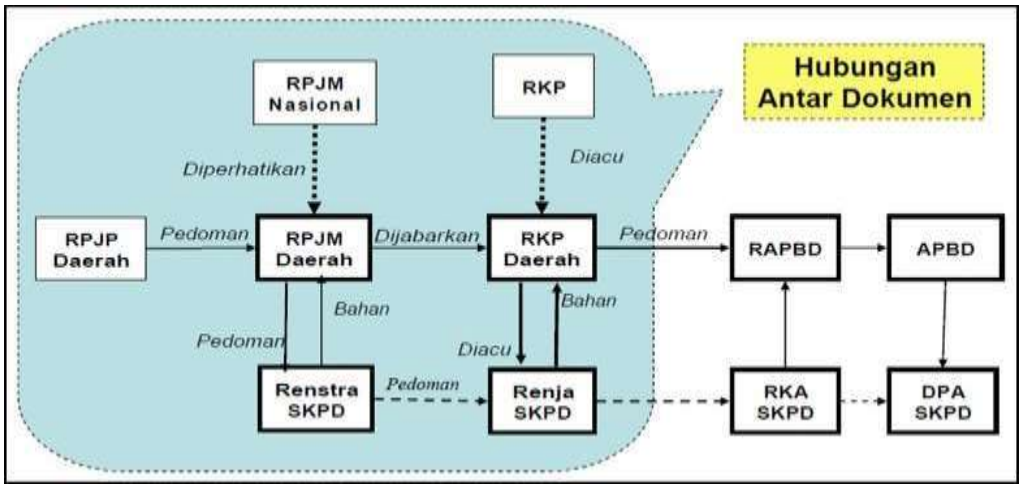

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Flores Timur mengacu pada Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang –Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Peningkatan Kapasitas koperasi, usaha mikro dan kecil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Pemutakhirannya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Flores Timur;

23. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

24. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;

25. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores TimurTahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan RENJA Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah tersedianya dokumen Rencana Kerja tahun 2023 yang merupakan penjabaran RENSTRA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dan selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan RENJA Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I.PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RENJA.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang evaluasi pelaksanaan renja Perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isuisu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang telahaan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah serta program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2023 serta Prakiraan Maju Tahun 2024.

BAB VII PENUTUP

Bab ini memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka penyusunan dokumen Renja Tahun 2023 perlu dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian Renstra Perangkat Daerah sampai Tahun Lalu sebagaimana digambarkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel TC.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian targetprogram/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022		Catatan
									Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)*	11=(10/4)*	12
	x	xx			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah										
	x	xx	01		**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**	**Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)**									
						Kualitas sarana parasarana aapratur (%)									
						Jumlah Dokumen Pengendaliaan dan Evaluasi Pencapaian Indikator Linerja OPD (dokumen)									
					Perencanaan, Penganggara, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
x	xx	01	2.01	06	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan (dokumen)	35	21	7	7	100%	7	35	100%	
x	xx				**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										
x	xx	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan tunjangan ASN (bulan)	-	-	14	14	100%	-	-	-	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022		Catatan
									Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)*	11=(10/4)*	12
x	xx	01	2.02	02	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi keuangan SKPD	Tersedianya jasa administrasi keuangan (bulan)	-	-	12	12	100%	12	-	-	
x	xx				**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor (komponen)	25	15	5	5	100%	2	22	88%	
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor kantor	Tersedianya Peralatan Gedung kantor (unit)	15	9	-	-	-	3	12	80%	
x	xx	01	2.02	04	Penyedian Bahan Logistik kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (jenis)	60	36	6	6	100%	13	55	92%	
						Tersedianya Alat Tulis Kantor (jenis)	160	96	32	32	100%	29	157	98%	
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (lembar)	266.070	159.642	53.214	53.214	100%	40.000	252.856	95%	
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan(jenis)	2	2	2	2	100%	2	2	100%	
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makanan dan minuman(Om)	625	276	92	92	100%	250	618	99%	
x	xx	01	2.06	09	Penyelnggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersediannya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah (kali)	145	60	23	23	100%	55	138	95%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022		Catatan
									Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)*	11=(10/4)*	12
x	xx	01	2.07		**Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	kualitas sarana prasarana aparatur (%)									
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Tersedianya Meubeler (unit)	15	-	-	-	0%	6	6	40%	
x	xx	01	2.08		**Penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran(%)									
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa Surat menyurat (kali)	750	450	150	150	100%	150	750	100%	
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik (bulan)	60	36	12	12	100%	12	60	100%	
x	xx	01	2.08	04	Jasa pelayanan umum kantor	jumlah jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran (orang)	30	30	30	30	100%	30	30	100%	
x	xx	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Derah**										
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang difasilitasi perizinannya	10	10	10	10	100%	10	10	100%	
						Tersedianya pelayanan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	1	1	1	1	100%	1	1	100%	
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantro yang dipelihara (unit gedung)	5	3	1	1	100%	1	5	100%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022		Catatan
									Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)*	11=(10/4)*	12
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor / bangunan lainnya	terpeliharaanya gedung kantor (unit)	1	1	1	1	100%	1	1	100%	
2	17	03			**Program Pengawasan dan pemeriksaan koperasi**	**Pengembangan Wirausaha baru / wirausaha pemula (wirausaha baru)**									
2	17	03	2.01		*Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota*										
2	17	03	2.01	01	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi / KUD yang dilatih (KUKM)	970	582	194	194	100%	194	970	100%	
						Jumlah koperasi yang diawasi/ diperiksa (koperasi)	325	65	15	15	100%	10	90	28%	
2	17	04			**Program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi**										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian targetprogram/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022		Catatan
									Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)*	11=(10/4)*	12
2	17	04	2.01		*Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota*										
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten / kota	Jumlah kelompok sasaran (koperasi)	50	30	10	10	100%	10	50	100%	
2	17	04	2.01	02	Penghargaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah kelompok sasaran (koperasi)	-	-	-	-	0%	10	10	0%	
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan latihan perkoperasian**	**Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)**									
2	17	05	2.01		Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi Aktif (Koperasi)									
2	17	05	2.01	01	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Sosialisasi, Sinkronisasi, sarasehan, Lomba Asah terampil	54	-	-	-	-	3	3	6%	
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**										

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun 2020			Target program / kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022		Catatan
									Target renja perangkat daerah tahun 2021	Realisasi renja perangkat daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)*	11=(10/4)*	12
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi	Koperasi aktif yang melaksanakan RAT (koperasi)	80	61	16	16	100%	40	117	146%	
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)**	**Jumlah UKM/LKM (UMKM)**									
						Pengembangan Wirausaha baru / wirausaha pemula (wirausaha baru)									
2	17	07	2.01		Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Jumlah UKM/LKM (UMKM)									
2	17	07	2.01	01	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah Dokumen Data Base UKM/UMKM (Dokumen)	5	3	1	1	100%	1	5	100%	
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Wirausaha Pemula/ Baru yang didampingi (UMKM)	1.500	500	-	-	0%	457	957	64%	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah DanProgram/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun2022	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan keluaran kegiatansampai dengan Tahun 2020	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatanSKPD tahun 2020			Target program /kegiatan (Renja SKPD 2022)	Perkiraan realisasi capaian targetprogram/kegiatan Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2022		Catatan
									Target renja perangkat daerahtahun 2021	Realisasi renja perangkat daerahtahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahunberjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7 +9)*	11=(10/4)*	12
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	UMKM yang dilatih(UMKM)	150	60	-	-	-	30	90	60%	
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	**Jumlah UKM/ KLM (UMKM)**									
						Pengembangan Wirausaha baru / wirausaha pemula (wirausaha baru)									
						UMKM dan Koperasi yang diperkuat Sistem Pemasaran (UMKM)									
2	17	08	2.01		*Pengembangan usaha mikrodengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil*										
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi	Jumlah fasilitas Pengembangan UKM (UKM)	55	3	1	1	100%	50	54	98%	
						Jumlah wirausaha pemula/wirausaha baru (UMKM)	500	3	1	1	100%	100	104	21%	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur didasarkan pada kajian capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis sebagaimana pada tabel 2.2 sebagai berikut ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target RENSTRA PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	Presentase Koperasi Aktif		√	20 %	20 %	85	88	14,13	-	85	88	Peningkatan Koperasi yang berkualitas diukur berdasrkan Jumlah Koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT
2	Presentase UKM non BPR/LKM aktif		√	4,37	4,37	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Kegiatan
3	Presentase BPR/LKM aktif		√	100%	100%	-	-	-	-	-	-	Tidak ada Kegiatan
4	Presentase Usaha Mikro dan Kecil		√	20 %	20 %	2,06	2,22	1,90	-	2,06	2,22	Jumlah Usaha Mikro yang menjadi wirausaha belum sebbanding dengan total Jumlah usaha mikro secara keseleruhaan karena tingkat modaldan SDM belum memadai

Berdasarkan tabel 2.2 diatas tingkat pelayanan capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Indikator Presentase Koperasi Aktif tingkat capaian mengalami Peningkatan yang diukur berdasarkan Jumlah koperasi yang mengikuti RAT(Rapat anggota Tahunan,sedangkan pada Indikator Presentase Usaha Mikro dan Kecil tingkat realisasi hanya mampu mencapai 1,90 % karena Jumlah usaha Mikro yang menjadi Wirausaha belum mencapai target dari jumlah Wirausah Mikro secara Keseluruhan karena tingkat Modal dan Pengembangan Terhadap SDM belum Memadai.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Salah satu tugas pokok Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yaitu melakukan Pembinaan dan pendampingan terhadap Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Pendampingan terhadap Koperasi dan UMKM berdasrakan data yang dilaporkan Melalui sistem ODS (Online Data Sistem) diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses Pendataan Koperasi dan pelayanan perizinan terhadap Koperasi Embrio koperasi yang akan difasilitasi menjadi koperasi yang berbadan Hukum, dengan memeperoleh Nomor Induk Koperasi dapat mengakses semua bantuan modal (LPDB).

Melaui perkembangan Digitalisasi Koperasi dapat Mempermudah semua akses Baik pelayanan perijizinan ,Pelayanan Modal Usaha dari lembaga keuangan Mikro dan diharapkan mampu meningkatkan pengembanagan terhadap Usaha Mikro kecil dan Menengah.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini Kelembagaan Koperasi usaha Mikro kecil dan menengah belum terdata secara baik sehingga dapat mempengaruhi tingkat realisasi Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah), dalam hal ini pendampingan maupun pembinaan terhadap koperasi dan UMKM. Adapun beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi Koperasi dan UMKM antara lain :

1. Belum Optimlanya Sistem Pendataan Pelaporan secara Online (ODS)
2. Kurangnya Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya manusia pengelola koperasi dan kurangnya kesadaran berkoperasi
4. Belum Optimalnya pengutana Kapasitas kelembagaan, bantuan permodalan,

Dalam Upaya meningkatkan Kinerja Pelayananan Koperasi dan UMKM Pemerintah

Kabupaten Flores Timur perlu menerapkan Sistem Pendataan Pelaporan secara Online (ODS) melalui Aplikasi ODS sehingga perkembangan usaha perkoperasian baik kelembagaan maupun pengawasan serta penilaian kesehatan dan pengahargaan koperasi dapat terlaksana secara optimal.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif perangkat daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur 2023 adalah sebagaimana yang tersaji pada tabel 2.4 Sebagai berikut:

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH				**5.080.116.878**	**DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**4.447.730.958**	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota					**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Larantuka	**Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantorran (%)**	**100**	***3.449.392.208***	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	Larantuka	**Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantorran (%)**	**100**	***3.449.392.208***	
		Larantuka	***Preentase ketersedian sarana dan Prasarana Aparatur(%)***	***100%***			Larantuka	***Preentase ketersedian sarana dan Prasarana Aparatur(%)***	***100%***		
		Larantuka	***Presentase ASN yang memeiliki kesesuaian Kompetensi (%)***	***100%***			Larantuka	***Presentase ASN yang memeiliki kesesuaian Kompetensi (%)***	***100%***		
		Larantuka	***Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)***	***100%***			Larantuka	***Presentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)***	***100%***		

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	***Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)***	12 dokumen	**73.388.885**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Larantuka	***Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)***	12 dokumen	**100.400.000**	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)*	2 dokumen	20.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Larantuka	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)*	2 dokumen	55.400.000	Pagu disesuiakan dengan Kebutuhan Untuk Kegiatan Musrenbang
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)*	4 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Larantuka	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)*	2	10.000.000	
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)*	4 laporan	33.388.885	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Larantuka	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)*	6	25.000.000	Pagu diseuikan Untuk Kebubutuhan untuk Penyusuna Dok. Laporan
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)*	2 laporan	10.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)*	4	10.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Larantuka	***Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)***	***3 dokumen***	**2.136.406.144**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Larantuka	***Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)***	***3 dokumen***	**2.136.406.144**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	*Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)*	29 org/12 bulan	2.070.956.144	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Larantuka	*Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)*	29 org/12 bulan	2.070.956.144	
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)*	1 dokumen	45.450.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Larantuka	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dok)*	12	45.450.000	
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	2 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Larantuka	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	2	20.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Larantuka	***Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)***	***6 dokumen***	***25.000.000***	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Larantuka	***Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)***	***6 dokumen***	***25.000.000***	
06	Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Dokumen	25.000.000	Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka	Jumlah Laporan Penatausahan Barang Milik Daerah pada SKPD	6	25.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Larantuka	***Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)***	***13 dokumen/ 5 orang***	***120.000.000***	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Larantuka	***Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)***	***13 dokumen/ 5 orang***	***100.000.000***	
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka	*Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	1 dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka	*Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian*	1	10.000.000	
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	12 dokumen	15.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Larantuka	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	12	15.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	2 orang	60.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Larantuka	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan*	2	40.000.000	Diseuikan kebutuhan untukpelatihan dan pendidikan pegawai
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	3 orang	35.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Larantuka	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan*	3	35.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)***	***100,0***	***312.800.000***	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)***	***100,0***	***302.800.000***	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Larantuka**	*Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*2 paket*	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	**Larantuka**	*Jumlah paket komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor yang disediakan (paket)*	*3*	3.000.000	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Larantuka**	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)(ATK dan Kelengkapan Komputer*	*AC 2 paket , kamera 1 paket, mesin potong rumput 2 unit, gunting bunga*	75.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	**Larantuka**	*Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)(ATK dan Kelengkapan Komputer*	*2*	60.000.000	Diseuikan Kebutuhan untuk Penyedian peralatan Kantor
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Larantuka**	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (BBM)*	1 Paket	45.500.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	**Larantuka**	*Jumlah paket bahan logistik kantor yang disiapkan (BBM)*	1 Paket	45.500.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Larantuka**	*Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)*	*2 paket (foto copi dan cetak)*	35.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	**Larantuka**	*Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)*	*2*	35.000.000	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Larantuka**	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*2 dokumen*	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	**Larantuka**	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan*	*2*	2.500.000	
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Larantuka**	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Rapat dan Tamu)*	12 laporan	33.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	**Larantuka**	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Rapat dan Tamu)*	12	33.000.000	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Larantuka**	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12 laporan	118.800.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	**Larantuka**	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	12	118.800.000	
						penatausahaan arsi dinamis pada SKPD	**Larantuka**	Jumlah dokumen penatausahaan arsi dinamis pada SKPD	1	5.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)***	***15 unit (12 kursi kerja,3 lemari)***	***235.000.000***	***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***		***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)***	***15 unit (12 kursi kerja,3 lemari)***	***249.388.885***	
01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*larantuka*	*jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang disediakan*	2 unit	65.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*larantuka*	*jumlah unit kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan yang disediakan*	2	60.000.000	
05	Pengadaan Mebeleur	*Larantuka*	*jumlah paket mebel yang disediakan mebel*	*3 unit*	20.000.000	Pengadaan Mebeleur	*Larantuka*	*jumlah paket mebel yang disediakan mebel*	*3*	15.000.000	Pengadaan Mebeleur untuk kebutuhan Kantor

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Larantuka*	*Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)*	*2*	49.388.885	Dibutuhkan untuk kepereluan kantor dan diseuikan dengan kebutuhan
08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	**Larantuka**	*Jumlah Unit Aset tak berwujud Lainnya yang Disediakan*	1 unit website BP4D	25.000.000						
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Larantuka**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 unit	75.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Larantuka**	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4	75.000.000	
11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Larantuka**	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	2 unit	50.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Larantuka**	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*	2	50.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)***	***100***	***428.300.000***	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)***	***100***	***427.300.000***	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (cetak kartu kendal surat, lembar disposisi dan buku agenda surat)*	12 laporan	1.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Larantuka	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (cetak kartu kendal surat, lembar disposisi dan buku agenda surat)*	12	1.500.000	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)*	12 laporan	85.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Larantuka	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)*	12	84.000.000	Diseuikan dengan kebutuhan penyedian jasa komiunikasi dan sumber daya air dan listrik

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	larantuka	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12 laporan	25.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	larantuka	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan*	12	25.000.000	
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)*	12 laporan (30 orang)	316.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Larantuka	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)*	12	316.800.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah(%)***	**100**	**118.497.179**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		***Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah(%)***	**100**	**108.097.179**	
01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Larantuka**	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	10 unit	38.497.179	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	**Larantuka**	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya*	10	38.497.179	
08	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	**Larantuka**	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	1 aset website Dinas Koperasi dan UKM	15.000.000	Pemeliharaan Aset Tidak berwujud	**Larantuka**	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara*	1	4.600.000	Diseuikan dengan kebutuhan untuk Honorium Pengelola website
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Larantuka**	*Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)*	*1 unit*	20.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	**Larantuka**	*Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara (unit)*	*1*	20.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Larantuka**	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)*	*15 laptop,printer 3 , infocus 1, PC unit 4,scaner 1, proyektor 4*	25.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Larantuka**	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)*	*24*	25.000.000	
11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Larantuka**	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)*	*1 unit*	20.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	**Larantuka**	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)*	*1*	20.000.000	
	PROGRAM URUSAN KOPERASI				**1.630.724.670**	**PROGRAM URUSAN KOPERASI**				**998.338.750**	
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		***prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi***	**47,83%**	**160.792.000**	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**		***prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi***	**47,83%**	**170.792.000**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi	Larantuka	***jumlah koperasi yang taat pada peraturan***	88 unit usaha	35.000.000	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi**	Larantuka	***jumlah koperasi yang taat pada peraturan***	88 unit	45.000.000	Diseuikan dengan kebutuhan untuk pengawasan koperasi
02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	***Larantuka***	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang -undangan kabupaten / kota	88 unit usaha	35.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	***Larantuka***	Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang -undangan kabupaten / kota	88	45.000.000	Diseuikan dengan kebutuhan untuk pemeriksaan koperasi yang taat
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	***Laratuka***	***Presentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi***	10 Koperasi	**125.792.000**	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	***Laratuka***	***Presentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi***	10 Koperasi	**125.792.000**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	***Laratuka***		10 Koperasi	125.792.000	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota**	***Laratuka***		10 Koperasi	125.792.000	
01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	***Laratuka***	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10 Koperasi	125.792.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	***Laratuka***	jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	10	125.792.000	
	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	***Larantuka***	***Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian***	**60**	**161.856.000**	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	***Larantuka***	***Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian***	**60**	**101.856.000**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota	Laratuka	*jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian*	*60*	161.856.000	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota**	Laratuka	*jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian*	*60*	101.856.000	Diseuikan dengan kebutuhan untuk pelatihan peningkatan SDM bagi Koperasi Aktif
01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Larantuka	*jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian*	60	161.856.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Larantuka	*jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian*	60	101.856.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	**Larantuka**	***Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)***	***40%***	**80.640.000**	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**Larantuka**	***Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)***	***40%***	**80.640.000**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Larantuka		10 keluarga (kelompok embrio)	80.640.000	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota**	Larantuka		1000%	80.640.000	
02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Laiinya	Larantuka	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainya	*10 keluarga (kelompok embrio)*	80.640.000	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Laiinya	Larantuka	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainya	*10*	80.640.000	
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Larantuka	***Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)***	***23,53***	***125.000.000***	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	Larantuka	***Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)***	***23,53***	***125.000.000***	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUBKEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melaui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				125.000.000	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melaui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**				125.000.000	
01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Larantuka	*Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota*	*240 unit usaha*	60.000.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Larantuka	*Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota*	*240*	60.000.000	
04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Larantuka	*Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro*	*30 unit usaha*	65.000.000	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Larantuka	*Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro*	*240*	65.000.000	
	Program Pengembangan UMKM	**Larantuka**	***Prosentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum***	***1,04***	**1.102.436.670**	**Program Pengembangan UMKM**	**Larantuka**	***Prosentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum***	***1,04***	**520.050.750**	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGITAN	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Larantuka		*6 unit usaha*	**1.102.436.670**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Larantuka		*10*	**520.050.750**	
01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM , Serta Desain dan Teknologi	Desa Lamanabi-Kecamatan Tanjung Bunga, Kel. Pohon Sirih, Kel.Balela, Desa Mokantarak, Kel. Amagarapi. Desa Birawan - Kecamatan Ile Bura	*Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Tekonologi* *Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi* *Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*6 unit usaha*	1.102.436.670	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM , Serta Desain dan Teknologi	Desa Lamanabi-Kecamatan Tanjung Bunga, Kel. Pohon Sirih, Kel.Balela, Desa Mokantarak, Kel. Amagarapi. Desa Birawan - Kecamatan Ile Bura	*Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Tekonologi* *Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan* *Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi* *Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*10*	520.050.750	Diseuikan dengan Kebutuhan untuk fasilitasi bagi UMKM dalam pengembangan usaha Mikro

2.5 Penelaahan Terhadap Usulan Masyarakat

Program/Kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencana bawah atas (bottom-up planning) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat maupun dari prangkat daerah kabupaten/kota maupun dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada prangkat daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu- isu penting penyelengara tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja perangkat daerah. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan Musrenbang Kecamatan dari awal bulan Maret sampai dengan awal bulan April Tahun 2022 dengan lingkup 19 Kecamatan dan telah dilakukan forum OPD dan dilanjutkandengan forum konsultasi publik Tahun 2022.

Rekapitulasi Musrenbang Kecamatan Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para pemangku kepentingan Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
	2		3	4	
	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1.	**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**		***prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi***	**47,83**	
	Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ unit Simpan Pinjam Koperasi		*jumlah koperasi yang taat pada praturan*	88 unit usaha	
	Sub Kegiatan : Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Larantuka	*Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang -undangan kabupaten / kota*	88 unit usaha	usulan terkait Ketaatan terhadap Koperasi. Diakomodir dalam Rencana Kerja
2.	**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**		***Presentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi***	10 Koperasi	
	Kegiatan : Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota				
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Larantuka	*jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan*	10 Koperasi	Usulan Terkait Penilaian Kesehatan Koperasi dilakasankan dalam kegiatan Rutin Urusan Pengawasan dan Kelembagaan Koperasi
3.	**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**		***Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian***	**0**	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
	2		3	4	
	Kegiatan : Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / Kota		*Jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian*		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Desa Lewotobi Kec. Ile Bura,Desa Konga Kec. Titehena, Desa Lamanabi Kec. Tanjung Bunga	*Jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian*	3 dokumen	Usulan Terkaitan Pelatihan dan Bimingan Teknis Terhadap Pengetahuan Koperasi. Diakomodir dalam Rencana Kerja
4.	**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	Larantuka	***Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)***	***40%***	
	Kegiatan :Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota				
	Sub Kegiatan : Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Laiinya	Larantuka	*Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainya*	*10 keluarga (kelompok embrio)*	*Kegiatan Sosilaisasi terhadap embrio koperasi dilaksanakan terpusat di Kabupaten*
5.	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**		***Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)***	**23,53**	
	Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melaui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
	2		3	4	
	Sub Kegiatan : Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		*Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota*	*240 unit usaha*	*Dilaksanakan Kegiatan untuk Pendataan terkait Usaha Mikro*
	Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kel.Amagarapati Kec. Larantuka	*Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro*	*30 unit usaha*	*Usulan terkait pemberdayaan kelembagaan untuk pengembangan usaha mikro. Diakomodir dalam Rencana Kerja*
6.	**Program Pengembangan UMKM**		***Prosentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum***	**1,04**	
	Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			*10 unit usaha*	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM , Serta Desain dan Teknologi	(Desa Lamanabi ,Desa Sinarhadiggala,Desa Lamatutu,Kolaka,Lewobunga, Gekeng Derang, patisirawalang, Latanliwo I Ratulodong,Sinarhadigala,Waibao, Bandona Bahinga Aransina Kecamatan Tanjung Bunga), (Kel. Pohon Sirih, Kel.Balela, Desa Mokantarak, Kel. Amagarapatii, Kel Pohon Sirih ,Kel Pantai Besar ,Kota FF Kelurahan Balela , Desa Lamawalang Kec. Larantuka). (Desa Birawan Kec Ile Bura) (Desa Daniwato Kec. Solor Barat),(Desa Tobi tika, Desa Hinga, Lamapaha,Horinara Nisakarang, Desa Keluwain,Desa Sukutokan, Desa Redontena,Desa Muda,Desa Lambunga, Desa Pepakelu,Desa Adobala,Desa mangaleng Kec Kelubagolit),(Desa Dokeng kec. Ile Boleng),(Desa Kolipetung,Desa Kolimasang,kolilanang,Desa lamahoda dan Tikatukang Kec. Adonara),(Desa Waiwadan Kec Adonara Barat),(Desa Tuwagoetobi, Desa Oringbele, Desa Watoone, Desa Riangduli Desa Lewopulo/Loga, Desa Balaweling Noten, Desa Balaweling Kecamatan Witihama.) (Desa Horowura Kec Adonara Tengah) (Desa Baliko kec. Wotan ulumado),(Desa watanhura II dan Desa Watohari ,Desa Motonwutun Kec. Solor Timur),(Desa Riangkemie dan Mudakeputu dan Desa Watotutu,Desa Tiwatobi Kec, Ile Mandiri),(Desa Bloto ,Desa Bilal ,Desa Dawata"a Desa Terong Desa Ipi Ebang Desa Narasaosina Desa Lamahala ,Desa Lamahala Jaya ,Desa Narasaosina ,Desa Waiburak Desa Lewokeleng,Kelurahan Waiwerang dan Waiburak,Desa lambunga Kec. Adonara Timur) ,(Desa Sinar Hading dan Ilepadung Kec. Lewolema)	*Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Tekonologi Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota*	*10 unit usaha*	*Usulan Terkait Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha Kecil.Diakomodir dalam rencana Kerja*

BAB III

TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan Daerah dan Nasional,serta untuk mendukung pencapaian visi dan misi RPJMN, Pemerintah telah menetapkan arahan utama sebagai strategi pelaksanaan pembangunan yang mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Untuk mendukung arahan pemerintah tersebut dan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan nasional tahun 2023, Pemerintah menetapkan tema RKP Tahun 2023 yaitu **"*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*"**, yang dilaksanakan dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional. Salah satu Prioritas Nasional yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu yakni PN1 : *Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitad dan berkeadilan*

Kebijakan Nasional tersebut sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Flores Timur (Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah) untuk meningkatkan jumlah Koperasi dan pengembangan Terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah melalui penguatan kelembagaan koperasi dan fasilitasi terhadap koperasi dan UMKM.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini mengambarakan sinergitas dan sinkronisasi pembangunan Daerah. Berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tujuan dan Sasaran Dinas Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Flores Timur dikaitkan dengan sasaran Kinerja Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TahunDasar	Target Kinerja Sasaran
			2021	2023
Terwujutnya daya Saing Ekonomi	Meningkatkan laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Meningkatnya laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	0,35%	1,06

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan pada Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Tema RKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 yakni: "***Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi dan daya saing daerah"*** dengan fokus pada 4 (empat) Proritas pembangunan. Sasaran dan target kinerja prioritas pembangunan tersebut dapat dilihat pada gambaran Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagai berikut;

PRIORITAS		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1		2		3	4
1	Perekonomian Masyarakat	1.3	Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian (dalam arti luas)	Laju pertumbuhan PDRB sektor Pertanian,kehutanan dan perikanan (%)	1,85
		1.5	Meningkatnya peran UMKM dan IKM dalam perekonomian daerah	Persentase wirausaha muda yang mandiri (%)	1,71

3.3 Program Dan Kegiatan

Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur, maka perlu dilaksanakan melalui program prioritas pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang mendukung target Kinerja dan Capaian Perangkat Daerah yang teridiri dari 2 (dua) Program Prioritas, 2 (dua) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegaiatan sebagaimana terlihat pada tabel 3.3 sebagai berikut;

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2023			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp,-)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	6	4	5	7		10	11
1					**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
2-17	**0-0**	**0-0**	**01**		**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**				**645.050.750**				**580.841.431**
2	**17**				**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**				645.050.750				580.841.431
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	***Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)***		**23,53**	***125.000.000***			**23,53**	**100.500.000**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melaui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para**	***jumlah usaha mikro yang diberdayakan(unit usaha)***		**240**	**125.000.000**			**240**	**100.500.000**
2	17	**07**	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan*	19 Kecamatan	*240*	60.000.000	APBD II (DAU)		*240*	50.000.000
2	17	**07**	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro(unit Usaha)*	19 Kecamatan	*240*	65.000.000	APBD II (DAU)		*240*	50.500.000
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	***Prosentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum(%)***		**1,04**	***520.050.750***			**1,67**	**480.341.431**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	***Jumlah UMKM yang terfasilitasi(Unit Usaha)***		***10***	**520.050.750**			***16***	**480.341.431**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM , Serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Tekonologi(Unit Usaha)*	19 Kecamatan	*10*	520.050.750	APBD II		*16*	480.341.431

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan Recana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023.

Rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 sebagimana dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2023

Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2-17	0-0	0-0	01		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			4.447.730.958						4.214.316.368
x	xx				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			3.449.392.208						3.421.974.937
x	xx	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	*Pesesentase perencanaan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)*	100	3.449.392.208				*PP*	100	3.421.974.937
						Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)	100						100	
						Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi (%)	100						100	
						Tingkat Pelayanan Administrsi Perkantoran(%)	100						100	
x	xx	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja (%)*	100	100.400.000				KP	100	103.900.000
x	xx	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)*	2	55.400.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	36.900.000
x	xx	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD(dok)*	2	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	15.000.000
x	xx	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD(laporan)*	6	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			6	37.000.000
x	xx	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah(Laporan)*	4	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			4	15.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	**xx**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase Pelaporan Keuangan (%)***	**100**	**2.136.406.144**				**KP**	**100**	**2.192.370.267**
x	xx	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang/bulan)*	29/14	2.070.956.144	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			29/14	2.112.375.266,88
x	xx	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (dok)*	12	45.450.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	49.995.000
x	xx	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	*Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD(laporan)*	2	20.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	30.000.000
x	**xx**	**01**	**2,03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	***Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)***	**6**	***25.000.000***				**KP**	**6**	**27.500.000**
x	xx	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD(laporan)*	6	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			6	27.500.000
x	**xx**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	***Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)***	**5**	***100.000.000***				**KP**	**5**	**145.000.000**
x	xx	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian(dokumen)*	1	10.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	15.000.000
x	xx	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	*Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dok)*	12	15.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	16.500.000
x	xx	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	*Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan(orang)*	2	40.000.000	Luar Daerah	APBD II (DAU)			2	75.000.000
x	xx	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)*	3	35.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	38.500.000
x	**xx**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)***	**100**	***302.800.000***				**KP**	**100**	**376.574.670**
x	xx	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (paket)*	3	3.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			3	3.300.000
x	xx	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)*	2	60.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	66.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)*	1	45.500.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	60.277.773
x	xx	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)*	2	35.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	45.000.000
x	xx	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (dok)*	2	2.500.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	2.750.000
x	xx	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)*	12	33.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	36.300.000
x	xx	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)*	12	118.800.000	Dalam dan Luar Da	APBD II (DAU)			12	156.946.897
x	xx	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	*Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)*	1	5.000.000		APBD II (DAU)			*1*	6.000.000
x	**xx**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (unit)***	**13**	***249.388.885***				**KP**	**0**	
x	xx	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	*Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan (unit)*	2	60.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	*Jumlah paket mebel yang disediakan (unit)*	3	15.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (unit)*	2	49.388.885						
x	xx	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah unit sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	4	75.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			-	-
x	xx	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah unit sarana dan prasarana Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan (unit)*	2	50.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			-	-
x	**xx**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)***	**100**	***427.300.000***				**KP**	**100**	**472.530.000**
x	xx	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	*Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)*	12	1.500.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	1.650.000
x	xx	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan (laporan)*	12	84.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			2	92.400.000
x	xx	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan(Laporan)*	12	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	30.000.000

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
x	xx	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (laporan)*	12	316.800.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			12	348.480.000
x	**xx**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	***Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah(%)***	**100**	**108.097.179**				**KP**	**100**	**104.100.000**
x	xx	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	*Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya (unit)*	10	38.497.179	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			10	47.000.000
x	xx	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	*Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (unit)*	1	4.600.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	4.600.000
x	xx	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (unit)*	1	20.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			1	25.000.000
x	xx	01	2.09	10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipeliharan/rehabilitasi(unit)*	24	25.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			31	27.500.000
x	xx	01	2,09	11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara (unit)*	1	20.000.000	Larantuka (OPD)	APBD II (DAU)			0	-
2	**17**				**Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**			998.338.750						**792.341.431**
2	**17**	**03**			**Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	***prosentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi(%)***	**47,83**	**45.000.000**				**PP**	**50**	**38.500.000**
2	**17**	**03**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	***jumlah koperasi yang taat pada praturan(Unit Usaha)***	**88**	***45.000.000***				**KP**	**92**	**38.500.000**
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah Koperasi yang memenuhi peraturan perundang -undangan Kewenangan kabupaten / kota*	88	45.000.000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			92	38.500.000
2	**17**	**04**			**Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi**	***Presentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi(%)***	**5,43**	**125.792.000**				**PP**	**5,43**	**50.000.000**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**17**	**04**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota**	***Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya(Unit usaha)***	**10**	***125.792.000***				**KP**	**10**	**50.000.000**
2	17	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	*jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan*	10	125.792.000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			10	50.000.000
2	**17**	**05**			**Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian**	***Presentase SDM yang memahami Pengetahuan Perkoprasian(%)***	**13,04**	**101.856.000**				**PP**	**19,57**	**78.000.000**
2	**17**	**05**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah Kabupaten / Kota**	***jumlah SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian(orang)***	***60***	**101.856.000**				**KP**	**60**	**78.000.000**
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	*jumlah SDM yang memehami pengetahuan perkoperasian(orang)*	*60*	101.856.000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			*60*	78.000.000
2	**17**	**06**			**Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	***Cakupan Pemberdayaan dan perlindungan Koperasi (%)***	***40***	***80.640.000***					**60**	**45.000.000**
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	***Jumlah Kelurga yang mengikuti sosilaisasi embrio Koperasi(Keluarga)***	10	**80.640.000**					15	45.000.000
2	17	06	2.01	02	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Laiinya	*Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainya(Keluarga)*	*10*	80.640.000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			*15*	45.000.000
2	**17**	**07**			**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)**	***Cakupan pemberdayaan usaha Menengah, kecil dan usaha Mikro(%)***	**23,53**	***125.000.000***			**PN-1**	**PU-1**	**23,53**	**100.500.000**
2	**17**	**07**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melaui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	***jumlah usaha mikro yang diberdayakan(unit usaha)***	**240**	**125.000.000**			**KP-1**	**KU-1**	**240**	**100.500.000**

KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN (Satuan)	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2023				PRIORITAS		PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)	LOKASI	SUMBER DANA	P N	P D	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp,-)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	17	**07**	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota (Unit Usaha)*	*240*	60.000.000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			*240*	50.000.000
2	17	**07**	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	*Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro(unit Usaha)*	*240*	65.000.000	19 Kecamatan	APBD II (DAU)			*240*	50.500.000
2	**17**	**08**			**Program Pengembangan UMKM**	***Prosentase UMKM yang bergerak dibidang pertanian yang berbadan Hukum(%)***	**1,04**	***520.050.750***			**PN-1**	**PU-1**	**1,67**	**480.341.431**
2	**17**	**08**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	***Jumlah UMKM yang terfasilitasi(Unit Usaha)***	***10***	**520.050.750**			**KP-1**	**KU-1**	***16***	**480.341.431**
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM , Serta Desain dan Teknologi	*Jumlah Unit Usaha Mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran SDM, serta Desain dan Tekonologi(Unit Usaha)*	*10*	520.050.750	19 Kecamatan	APBD II			*16*	480.341.431

BAB. V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 mengacu pada tugasnya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Urusan Koperasi dan UMKM, disamping program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk dilaksanakan tahun 2023. Penentuan prioritas tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu mendesak untuk dilaksanakan, menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, memiliki peran dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan daerah dan realistis untuk dilaksanakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur akan dilaksanakan pada tahun 2023. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan tujan dan sasaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Melalui penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien,dalam kerangka mewujudkan tata pemerintahanyang bersih dan berwibawa.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kabupaten Flores Timur,

Achmad R. Duli, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19650516 199203 1 008